

Sikap muhammadiyah di tengah kontestasi pemilihan presiden pasca orde baru

Ahmad Ashim Muttaqin ¹

¹ Studi Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

*) Corresponding Author (Email: masaqin@gmail.com)

Abstract

Presidential elections as part of the implementation of democracy are a political process involving every element of the nation, including Islamic organizations. Muhammadiyah as one of the largest Islamic organizations in Indonesia is required to play its role and attitude in every presidential election held directly after the New Order. As for this study, the author examines what are the basic views of Muhammadiyah politics, the stance taken in the midst of presidential election contestation, and the diversity of choices of Muhammadiyah citizens in supporting presidential candidates. The results of this study explain that Muhammadiyah believes in politics as one part of Islamic teachings. Based on the mandate of Khittah and the organizational attitude decided, Muhammadiyah declared itself actively neutral at every moment of the presidential election and freed its citizens to exercise their voting rights according to conscience. Even so, in some presidential elections Muhammadiyah tends to support one partner

Keywords: Muhammadiyah, Politics, Presidential elections.

Abstrak

Pemilihan Presiden sebagai bagian dari implementasi demokrasi merupakan proses politik yang melibatkan setiap unsur bangsa, tak terkecuali organisasi Islam. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dituntut untuk memainkan peran dan sikapnya di setiap pilpres yang dilaksanakan secara langsung pasca Orde Baru. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengkaji apa yang menjadi pandangan dasar politik Muhammadiyah, sikap yang diambil di tengah kontestasi pilpres, serta keberagaman pilihan warga Muhammadiyah dalam mendukung pasangan calon presiden. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Muhammadiyah meyakini politik sebagai salah satu bagian dari ajaran Islam. Berdasarkan amanat Khittah dan sikap keorganisasian yang diputuskan, Muhammadiyah menyatakan diri netral aktif di setiap momen pilpres dan membebaskan warganya untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Meski begitu, dalam beberapa pilpres Muhammadiyah cenderung mendukung salah satu pasangan

Kata kunci: Muhammadiyah, Politik, Pemilihan Presiden.

1. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya adalah *zoon politicon* (binatang yang berpolitik). Dengan begitu segala lini kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dengan politik. Miriam Budiardjo menjelaskan politik ialah usaha masyarakat untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik (Budiardjo, 2018). Politik sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat supaya diatur dengan baik. Hal tersebut disebabkan terbatasnya sumber daya sehingga perlu dirumuskan

mekanisme pembagian sumber daya agar semua masyarakat bisa merasakan kebahagiaan. Pembagian tersebut dilakukan dengan instrumen kekuasaan yang akan mengelola sumber daya yang tersedia.

Indonesia menerapkan instrumen kekuasaan berdasarkan sistem demokrasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sekaligus menyatakan bahwa yang berkuasa ialah rakyat. Dengan begitu dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Implementasi sistem demokrasi juga bisa ditinjau dari dimulainya keterbukaan politik sejak tahun 1998, yang mana pada tahun tersebut mulai diadakan pelaksanaan pemilihan umum atau yang disebut dengan Pemilu.

Pemilu menjadi syarat utama penerapan demokrasi di dalam negara. Sebab prinsip fundamental dari negara demokrasi ialah setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah mekanisme implementasi demokrasi guna menentukan anggota eksekutif dan legislatif, baik di pusat maupun daerah. Pemilu memiliki substansi penting bagi keberlangsungan demokrasi, sebab setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang, dapat menggunakan haknya untuk memilih pemimpin pemerintahan. Oleh sebab itu, semua unsur yang ada di dalam masyarakat dinantikan peran aktifnya sehingga bisa menghasilkan pemimpin dan kepemimpinan yang baik.

Salah satu jenis pemilu yang dilaksanakan di Indonesia adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau seringkali disingkat Pilpres. Pilpres yang dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia dimulai sejak tahun 2004. Dengan masa jabatan Presiden selama 5 tahun, pelaksanaan Pilpres secara langsung pasca Orde Baru hingga hari ini telah terlaksana sebanyak lima kali, yakni di tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024.

Sebagai bagian dari proses politik, pilpres pada pelaksanaannya melibatkan semua kalangan, mulai dari partai politik, pengusaha, mahasiswa, berbagai kalangan masyarakat hingga organisasi keagamaan. Terlebih lagi umat muslim merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. Maka tak mengherankan apabila partai politik dan pasangan calon presiden melihat umat dan organisasi Islam sebagai magnet massa pemilih. Salah satu organisasi Islam yang mempunyai peran cukup vital dalam politik Indonesia ialah Muhammadiyah.

Muhammadiyah adalah organisasi dan gerakan Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah konsisten menegaskan diri sebagai organisasi keagamaan, bukan organisasi politik. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tegas menolak usulan Haji Agus Salim, Haji Misbach, dan Cokroaminoto agar menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi politik (Al Hamdi, 2023). Begitupun permintaan Soeharto agar Muhammadiyah menjadi partai politik ditolak oleh Ahmad Badawi.

Sekalipun bukan organisasi politik, Muhammadiyah tetap tidak bisa melepaskan diri dari hiruk pikuk politik. Sebab Muhammadiyah memahami bahwa politik adalah salah satu bagian dari *mu'amalah-duniawiyah* yang perlu dibingkai dan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga Muhammadiyah memperjuangkan politik tidak dalam koridor

politik praktis yang menginginkan kekuasaan, melainkan politik moral, politik nilai atau politik kebangsaan.

Apabila ditinjau secara historis, Muhammadiyah memang pernah bersentuhan langsung dengan politik praktis. Hal ini terlihat ketika Muhammadiyah memprakarsai pendirian Partai Islam Indonesia (1937), menjadi anggota istimewa partai Masyumi (1945-1959), memprakarsai pendirian Partai Muslimin Indonesia (1968), merestui Amien Rais untuk mendirikan Partai Amanat Nasional (1998) serta menjadi calon presiden, dan merestui pendirian Partai Matahari Bangsa (2006). Dalam konteks ini, Haedar Nashir menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan sikap politik kondisional dan bukan pengingkaran terhadap keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan (Nashir, 2019).

Peneguhan posisi Muhammadiyah dalam kerangka politik dijelaskan dalam Khittah Muhammadiyah yang menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan Islam non politik, yang konsisten berada dalam jalur dakwah kemasyarakatan, serta tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai politik manapun. Meski begitu, ditengah kontestasi pilpres sebagai hajat besar demokrasi Indonesia, Muhammadiyah dengan sumber daya dan pengaruh yang dimiliki, dituntut untuk memberikan sikap yang jelas, Artikel ini akan membahas sikap yang diambil Muhammadiyah di tengah kontestasi pilpres pasca orde baru serta keberagaman pilihan warga Muhammadiyah dalam mendukung pasangan calon presiden

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yakni telaah kepustakaan sebagai metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku yang membahas masalah tersebut dan juga pandangan serta pemikiran peneliti lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen resmi Muhammadiyah, adapun sumber data sekunder adalah literatur yang terkait dengan sikap politik Muhammadiyah di tengah kontestasi Pilpres pasca Orde Baru.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk dapat memahami pemikiran dasar Muhammadiyah yang berkaitan dengan politik, sekiranya perlu untuk merujuk terhadap Khittah Perjuangan Muhammadiyah. Khittah memiliki arti garis perjuangan, dengan maksud landasan dan pola dasar Muhammadiyah dalam bergerak yang mana didalamnya terkandung strategi dan taktik Muhammadiyah dalam memperjuangkan tujuannya. Hingga saat ini, Muhammadiyah telah merumuskan khittah sebanyak enam kali. yakni Khittah 12 Tafsir Langkah Muhammadiyah tahun 1938, Khittah Palembang tahun 1956, Khittah Ponorogo tahun 1969, Khittah Ujung Pandang tahun 1971, Khittah Surabaya tahun 1978 dan Khittah Denpasar tahun 2002.

Apabila ditinjau dari substansinya, Khittah Perjuangan Muhammadiyah merupakan kerangka berfikir guna memahami dan memberikan solusi atas segala permasalahan yang dihadapi Muhammadiyah berdasarkan situasi di sekitarnya. Secara prinsip, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan adalah salah satu bagian dari ajaran Islam dalam aspek mu'amalah duniawiyah yang harus diarahkan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebagai upaya memajukan kehidupan bangsa dan negara, diperlukan perjuangan politik langsung yang berorientasi kekuasaan dan perjuangan politik tidak langsung berupa pembinaan masyarakat.

Dalam hal ini, Muhammadiyah memilih berjuang dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Khittah Ujung Pandang bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat serta tidak memiliki hubungan organisatoris dan afiliasi dengan partai politik manapun. Muhammadiyah juga membolehkan anggotanya berdasarkan hak asasinya untuk memasuki organisasi lain selama tidak menyalahi ketentuan Muhammadiyah.

Meski memilih bergerak di ranah kemasyarakatan, Muhammadiyah tetap mendorong secara kritis perjuangan politik praktis yang dieksekusi oleh berbagai aktor politik dengan mengutamakan kepentingan rakyat serta nilai-nilai luhur. Sebagaimana tercantum di Khittah Perjuangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang diputuskan dalam Tanwir Muhammadiyah di Denpasar pada tahun 2002 yang menegaskan bahwa:

"Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan memengaruhi proses kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban".

Muhammadiyah juga merumuskan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang didalamnya menerangkan bahwa warga Muhammadiyah harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik sebagai wujud bermuamalah (P. P. Muhammadiyah, 2010). Di dalam dokumen tersebut juga dijabarkan beberapa prinsip dalam berpolitik, diantaranya adalah melaksanakan amanah, menegakkan keadilan, hukum dan kebenaran, mentaati pemimpin selama sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul, tidak merampas hak orang lain, serta mengutamakan ukhuwah Islamiyah, maslahat, ihsan serta islah. Dalam beberapa literatur, hal-hal yang dijabarkan di atas seringkali disebut sebagai *high politics*.

Amien Rais berpandangan bahwa Muhammadiyah memiliki peran *high politics*, yakni politik yang luhur, adiluhung serta memiliki dimensi moral etis. Antitesis dari *high politics* adalah *low politics*, yaitu politik praktis berorientasi kekuasaan serta biasanya berujung nista (Anwar, 2023). Ahmad Syafi'i Ma'arif kemudian menambahkan definisi *high politics*, yakni politik yang mengabdikan kepada tujuan moral yang luhur, anggun serta sejalan dengan harkat martabat manusia yang beriman.

Sementara itu Din Syamsuddin lebih sering menggunakan istilah Politik Alokatif, yakni politik yang mendistribusikan substansi nilai-nilai Islami dan moral ke dalam proses politik sebagai dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Adapun terdapat tiga ciri dasar *high politics*, yakni amanah, pertanggungjawaban dan ukhuwah (Rais, 2004).

Lebih lanjut Haedar Nashir menjabarkan konsep *high politics* dalam Muhammadiyah berupa (Putro, 1999);

a. Konsep Khittah

Substansi dari khittah adalah sikap netralitas Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan dan kepentingan politik, yang memberi kemungkinan bagi Muhammadiyah untuk tetap menjaga jarak dan menjadi subordinasi dari kekuatan politik yang ada.

b. Supremasi Nilai

Konsep *high politics* memiliki makna bagaimana moral memiliki supremasi dalam menentukan langkah-langkah politik Muhammadiyah, sehingga ada batas apa yang dilakukan dan apa tidak dilakukan.

c. Keaktifan

Konsep *high politics* pada dasarnya merupakan kendali mekanisme internal bagi pelaku politik di Muhammadiyah agar tidak terjebak dalam politik praktis.

Ma'mun Murod Al-Barbasy menjelaskan terdapat ambiguitas terkait relasi Muhammadiyah dengan politik, yakni antara *keep close* dan *keep distance*. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal, pertama pandangan umum di lingkungan Muhammadiyah bahwa Islam dan negara adalah dua bagian yang tak bisa dilepaskan. Terlebih Muhammadiyah berperan besar saat kemerdekaan Indonesia, sehingga memiliki tanggung jawab dalam pergantian kepemimpinan nasional. Kedua pemerintah yang terpilih melalui proses politik kerap kali tidak proporsional dalam meletakkan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam. Muhammadiyah diperlakukan selayaknya partai politik yang diminta terlibat dalam politik partisan (Al-Barbasy, 2018).

Sementara menurut Syarifuddi Jurdi, opsi Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam politik menjadi konsekuensi interpretasi Islam yang integratif (Jurdi, 2010). Dinamika politik dengan berbagai institusi dan situasi kebangsaan dijalankan Muhammadiyah guna mewujudkan tujuannya. Tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya dapat tercapai dengan memaksimalkan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk di dalamnya adalah politik.

Berkaitan dengan politik pemilu, keputusan Tanwir Muhammadiyah tahun 2012 di Bandung tentang Kristalisasi Ideologi Muhammadiyah telah memutuskan secara tegas dua hal sebagai berikut.

"Pertama, Muhammadiyah dengan ideologi gerakannya melakukan ijtihad politik lebih memilih strategi perjuangan pembinaan masyarakat dan tidak menempuh perjuangan politik-praktis dalam ranah kekuasaan-negara. Khittah Muhammadiyah tersebut didasarkan pada pandangan bahwa politik merupakan urusan duniawi (al-umr al-dunyawiyyat) yang format dan strateginya merupakan ranah ijtihad. Namun Muhammadiyah sejak berdiri tahun 1912 pada masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini dan ke depan terus proaktif menjalankan peran-peran kebangsaan untuk mencerdaskan, memakmurkan, dan memajukan kehidupan bangsa sebagai perwujudan dari dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar dalam berbangsa dan bernegara. Khittah Muhammadiyah tidak mengandung makna antipolitik dan apolitik, tetapi memposisikan politik dalam makna yang luas sebagai aspek dan sarana perjuangan membangun kehidupan bangsa dan negara. Kedua, dalam menghadapi dinamika kehidupan politik khusus yang berkaitan dengan Pemilu dan PemiluKada yang selalu berlangsung reguler lima tahunan hendaknya setiap anggota Muhammadiyah berpartisipasi sebagai pemilih kritis, cerdas, dan menjunjung tinggi akhlak mulia; tidak melibatkan organisasi dalam percaturan politik praktis; menjauhi politik uang dan hal-hal yang tidak terpuji; memberi teladan berpolitik yang mengedepankan demokrasi berkeadaban, dan senantiasa istiqamah mengindahkan Khittah dan kebijakan organisasi yang berlaku dalam Persyarikatan. Politik berbasis ideologi Muhammadiyah tersebut disertai dengan sikap proaktif dalam menjalankan peran-peran kebangsaan yang membawa pada kemajuan serta mencegah segala bentuk tindakan atau kebijakan yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara sesuai prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar secara cerdas dan bijaksana."

Apabila dirangkum, sikap Muhammadiyah di dalam setiap pemilu ialah netral aktif. Konsep netralitas bisa dipahami dalam dua segi, yakni tidak berafiliasi dengan aktor politik manapun serta independen terhadap negara. Begitupun sikap aktif merupakan partisipasi Muhammadiyah dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan negara guna tercipta masyarakat demokratis dan berkeadaban. Sebagaimana metafora yang disampaikan oleh

Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti, bahwa peran politik kebangsaan Muhammadiyah ialah laksana garam, senantiasa memberi rasa sekalipun tidak terlihat secara langsung (Ainur, 2023).

Pemilihan Presiden 2004

Pilpres 2004 merupakan pemilu langsung pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Pilpres yang berlangsung selama dua putaran, yakni pada 5 Juli dan 20 September 2004 ini diikuti oleh lima pasangan calon, yaitu Wiranto dan Salahudin Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi, Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, serta Hamza Haz dan Agum Gumelar.

Momen pilpres 2004 sebagai bagian perjuangan reformasi, nampaknya dibaca Muhammadiyah sebagai peluang untuk mengerahkan segala potensi sumber daya yang dimilikinya dalam ranah politik. Hal ini bisa dilihat dari hasil Sidang Pleno diperluas PP Muhammadiyah yang diadakan pada 9-10 Februari 2004 di Yogyakarta yang menghasilkan keputusan berupa:

“Pertama, mendukung sepenuhnya langkah Prof. Dr. H.M. Amien Rais selaku kader terbaik dan mantan Ketua PP Muhammadiyah serta tokoh reformasi untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyelamatan bangsa dalam pemilihan Presiden pada Pemilu 2004. Kedua, Presiden Indonesia yang diharapkan terpilih dalam pemilu 2004 untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyelamatan bangsa adalah tokoh yang reformis, bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, memiliki visi kebangsaan yang luas, tegas dan berwibawa dalam membawa bangsa ke tengah pergaulan internasional, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memajukan kehidupan bangsa menuju kemasa depan yang lebih baik. Ketiga, meminta kepada warga Muhammadiyah dan mengajak kepada masyarakat untuk mendukung terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang dapat mengemban amanat reformasi serta penyelamatan bangsa.”

Keputusan tersebut seolah menunjukkan penyimpangan Muhammadiyah kepada amanat Khittah Ujung Pandang 1971 dan Khittah Denpasar 2002. Ketua Umum Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya yang didukung tidak hanya Amien Rais, melainkan setiap tokoh yang memenuhi parameter Muhammadiyah, kebetulan yang memenuhi kriteria tersebut Amien Rais (Amin, 2004). Beberapa tahun kemudian Syafi'i Ma'arif mengakui bahwa penyimpangan tersebut disepakati bersama antara PP dan PW Muhammadiyah sebab kondisi darurat saat itu mengharuskan Muhammadiyah untuk turut serta memperjuangkan jalannya reformasi (Syahputra, 2014).

Tidak dapat dipungkiri bahwa bergulirnya reformasi membuat partisipasi politik Muhammadiyah menguat. Pramono Ubaid menjelaskan menguatnya partisipasi politik warga Muhammadiyah merupakan implementasi komitmen kebangsaan Muhammadiyah serta momentum guna menguatkan kembali *sense of politics* warga Muhammadiyah yang mengalami depolitisasi selama Orde Baru (Tanthowi, 2019). Dalam konteks pilpres, figur Amien Rais selaku mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah memiliki pengaruh yang besar di kalangan Muhammadiyah. Hampir setengah lebih warga Muhammadiyah memilih Amien Rais sebagai presiden pada pilpres 2004 (Dewi, 2010).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga LP3ES dan NDI, warga Muhammadiyah yang memilih Amien-Siswono sebesar 54%, Wiranto-Salahuddin sebesar 13%, Megawati-Prabowo sebesar 11%, Susilo-Kalla sebesar 21%, dan Hamzah-Agum

sebesar 2% (Suwarno, 2005). Walaupun demikian, kontestasi pilpres 2004 pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

Pemilihan Presiden 2009

Pilpres 2009 dilakukan pada tanggal 9 Juli 2009 dan diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, serta Jusuf Kalla dan Wiranto. Berkaca dari pengalaman pilpres 2004, hasrat politik Muhammadiyah nampaknya masih begitu kuat. Hal ini terlihat dari masuknya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam bursa bakal calon presiden Indonesia dan diusung oleh Partai Matahari Bangsa (PMB). PMB merupakan partai yang berdiri pada 16 Desember 2006 dan lahir dari kekecewaan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) terhadap PAN yang dianggap kurang mampu menyalurkan aspirasi dan kepentingan Muhammadiyah (Sholikin, 2020).

Terkait wacana tersebut, Ridho Al Hamdi menjelaskan lima catatan penting. Pertama, Muktamar Muhammadiyah 2005 melahirkan adanya kontrak moral di antara pimpinan Muhammadiyah bahwa akan berkomitmen mengabdikan diri di Muhammadiyah hingga akhir periode. Kedua, kalangan elit Muhammadiyah belum memberikan restu kepada Din untuk maju menjadi capres. Ketiga, PMB selaku partai yang mengusung Din sebagai capres bukanlah partai yang besar dan belum teruji dalam pemilu. Keempat, kader-kader Muhammadiyah tersebar di berbagai partai sehingga sulit untuk disatukan dalam satu isu. Kelima, kecenderungan warga Muhammadiyah merupakan pemilih yang rasional (Al Hamdi, 2009).

Menjelang berlangsungnya pilpres, PP Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap yang pada substansinya berisi: Pertama, segenap aktor politik hendaknya menjadikan pemilu sebagai proses demokrasi yang sehat dan beradab, begitupun panitia pemilu harus jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemilu yang demokratis. Kedua, menghimbau kepada setiap warga negara yang mempunyai hak pilih untuk mencoblos dengan cerdas dan disertai sikap dewasa dalam menerima hasilnya. Ketiga, menjadikan pemilu dan proses politik guna kepentingan penyelamatan nasional, revitalisasi reformasi dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaulat (Bambang, 2009).

Meskipun secara keorganisasian Muhammadiyah tidak mendukung salah satu pasangan calon, namun secara eksplisit, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengungkapkan dukungannya kepada pasangan Kalla-Wiranto. Menurut Din Syamsuddin, banyak warga Muhammadiyah yang mendoakan agar Kalla-Wiranto terpilih menjadi Presiden Indonesia (Saifullah, 2009). Begitupun saat rapat PP Muhammadiyah bersama dengan PWM pada tanggal 27 Mei 2008 di Yogyakarta, mayoritas PWM menyatakan dukungannya terhadap pasangan Kalla-Wiranto (Taufiq, 2010).

Banyak AMM yang terlibat dalam tim sukses Kalla-Wiranto dan membentuk Tim 1912. Begitupun PMB yang secara kepartaian menyatakan dukungannya kepada Susilo-Boediono. Sementara dalam analisa David Effendi, Muhammadiyah secara simbolis mendukung dua pasangan calon, yakni Megawati-Prabowo dan Kalla Wiranto (Effendi, 2014). Hal ini ditengarai dengan dijadikannya Kantor Muhammadiyah sebagai tempat bertemunya kedua pasangan calon tersebut dalam pembahasan polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pemilihan Presiden 2014

Pilpres 2014 dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014 dan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, serta Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Di awal tahun 2014,

Muhammadiyah mengeluarkan himbauan menjelang pemilu berdasarkan hasil rapat pleno diperluas PP Muhammadiyah pada tanggal 3 Januari 2014. Imbauan yang berisi 7 poin tersebut pada esensinya membahas mengenai pandangan bahwa pemilu tidak hanya sekedar suksesi kepemimpinan belaka, melainkan momentum jihad politik dan sarana membangun demokrasi yang substantif, harapan kepada penyelenggara, peserta dan pemilih untuk melaksanakan pemilu secara berkeadaban, serta dorongan kepada warga Muhammadiyah agar menggunakan hak pilihnya secara cerdas serta senantiasa menjaga martabat organisasi.

Ketentuan mengenai aktivitas politik warga Muhammadiyah sebelumnya juga pernah ditegaskan dalam SK PP Muhammadiyah Nomor 41/KEP/I.0/B/2013 yang menjelaskan bahwa pimpinan Muhammadiyah yang mencalonkan diri menjadi DPR/DPRD diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya beserta keanggotaannya. Adapun jika mencalonkan diri menjadi DPD dan jabatan eksekutif, cukup berhenti dari jabatannya tanpa kehilangan keanggotaan. Ketentuan tersebut juga menerangkan larangan menggunakan dan melibatkan amal usaha, lambang/symbol, dana, dan infrastruktur yang dimiliki Muhammadiyah untuk kepentingan politik praktis.

Pada Tanwir Muhammadiyah tanggal 23-25 Mei 2014, kedua capres diberikan kesempatan untuk memaparkan visi-misinya. Forum Tanwir juga mengeluarkan Maklumat Kebangsaan Menghadapi Pemilihan Presiden 2014 yang berisi tiga poin; Pertama, Muhammadiyah memandang pilpres sebagai sesuatu yang strategis karena menentukan berjalannya pemerintahan menuju tercapainya cita-cita nasional, sehingga perlu partisipasi aktif seluruh komponen bangsa. Kedua, seruan kepada para calon dan pendukungnya agar berkompetisi dengan ksatria dan bermartabat, serta menjauhi praktek-praktek yang mencederai demokrasi. Ketiga, menegaskan kembali bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun.

Tanwir tersebut juga memutuskan beberapa kriteria sebagai pedoman warga Muhammadiyah dalam memilih calon Presiden/Wakil Presiden, berupa:

- a. berjiwa religius, taat beribadah dan berintegritas tinggi, sejalan antara kata dan perilaku
- b. memiliki visi dan karakter kuat sebagai negarawan, yang mampu membangun solidaritas kebangsaan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas diri sendiri, partai politik dan kroni.
- c. berani mengambil keputusan strategis dalam memecahkan masalah-masalah krusial bangsa dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta penyelamatan aset dan kekayaan negara.
- e. menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman dalam dan di luar negeri
- f. memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa.
- g. berkomitmen terhadap aspirasi politik umat Islam dan mewujudkan Indonesia yang berkembang.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menegaskan bahwa Muhammadiyah secara organisasi tidak memihak salah satu kandidat pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam kontestasi pilpres 2014 (Amirullah, 2014). Muhammadiyah juga memberi kebebasan kepada warganya guna mencoblos dengan cerdas calon pemimpin yang dinilai dianggap mampu mewujudkan tujuan Muhammadiyah dan bangsa, yakni membawa Indonesia maju, adil dan makmur

Kebebasan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh beberapa warga Muhammadiyah untuk bergabung di tim sukses dan membentuk kelompok relawan pendukung pasangan capres. Kader Muhammadiyah yang bergabung dengan tim sukses Prabowo Hatta adalah Amien Rais dan Bahtiar Effendy (Ketua PP Muhammadiyah), sementara di tim sukses Jokowi-Kalla terdapat Soetrisno Bachir, Izzul Muslimin dan Imam Addaruqutni. Di kubu Prabowo-Hatta juga terdapat Surya Madani Indonesia yang dipimpin oleh Syafruddin Anhar. Sedangkan kubu Jokowi-JK terdapat Relawan Matahari Indonesia yang dipimpin oleh Izzul Muslimin. Selain itu, Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah juga terlibat dalam Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu (Amrullah, 2014).

Dalam rilis hasil Exit Poll Pemilu 2014 yang dilakukan oleh lembaga Indikator, masyarakat yang berafiliasi dengan Muhammadiyah yang memilih pasangan Prabowo-Hatta 46,9%, yang memilih Jokowi-Kalla sebesar 36,6%., dan 16,5% responden tidak menjawab (I. P. Indonesia, 2014).

Pemilihan Presiden 2019

Pilpres 2019 dilakukan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Muhammadiyah bersama Nahdlatul Ulama pada tanggal 18 Oktober 2018 mengeluarkan pernyataan bersama dalam rangka persiapan momen politik di tahun 2019 (Alawi & NF, 2018). Pernyataan tersebut pada esensinya berisi mendukung proses demokrasi dan seleksi kepemimpinan nasional secara konstitusional dan berkeadaban. Kedua ormas ini juga berharap agar semua pihak yang terlibat dalam proses politik supaya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, sehingga tidak merugikan kehidupan masyarakat Indonesia.

Sama seperti pilpres sebelumnya, di tahun 2019 ada kader-kader Muhammadiyah yang menjadi tim sukses dan membentuk simpul relawan. Di tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf terdapat Raja Juli Antoni (mantan Ketua IPM, sekretaris Partai Solidaritas Indonesia), Ahmad Rofiq (mantan Ketua IMM, sekretaris Perindo) dan Imam Addaruqutni (mantan Ketua PM). Sementara di badan pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga terdapat Amien Rais, Dahnil Anhar Simanjuntak (mantan ketua PM) dan Suyatno (bendahara PP Muhammadiyah).

Keberpihakan Amien Rais selaku mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah diharapkan bisa menjadi rujukan warga Muhammadiyah dalam memilih calon Presiden. Amien Rais juga mendorong agar Muhammadiyah bersikap untuk mendukung salah satu calon. Dorongan tersebut dihiraukan Muhammadiyah sebagaimana ditandaskan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2018 di Bengkulu yang memutuskan bahwa Muhammadiyah netral, tidak berpihak ke pasangan Jokowi-Ma'ruf ataupun ke Prabowo-Sandiaga (C. Indonesia, 2019). Begitupun keberpihakan Amien Rais juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perolehan suara Prabowo-Sandiaga (Zainuddin, 2019).

Sementara dalam kelompok relawan, di kubu Jokowi-Ma'ruf terdapat Eksponen Muda Muhammadiyah yang dipimpin oleh Andre, Rumah Indonesia Berkemajuan yang dipimpin oleh Khoirul Muttaqin, Perempuan Muhammadiyah yang dipimpin Adinda Saidah, Jaringan Satu Matahari yang dipimpin Noor Fajar Asa, dan Alumni Perguruan Muhammadiyah for Jokowi yang dipimpin Andi Azwan. Sementara di kubu Prabowo-Sandi terdapat Aliansi Pencerah Indonesia yang dipimpin oleh Izzul Muslimin.

Meski begitu, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa keberadaan kader Muhammadiyah di tim sukses dan simpul relawan merupakan pilihan pribadi, bukan atas delegasi Muhammadiyah secara keorganisasian (Widjaja, 2018). Hanya

saja tensi politik di tahun 2019 yang begitu tinggi menyebabkan internal Muhammadiyah juga mengalami konflik (Walinegoro & Widodo, 2022). Oleh sebab itu PP Muhammadiyah mengeluarkan instruksi tentang “Menjaga Netralitas Persyarikatan dan Amal Usaha” yang pada esensinya berisi arahan kepada warga Muhammadiyah untuk memedomani kepribadian, khittah serta kebijakan PP Muhammadiyah dalam menghadapi tahun politik 2019.

Kader-kader Muhammadiyah juga terlibat dalam pengawasan pemilu seperti Jaringan Pemantau Pemilu Muhammadiyah (JPPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan ‘Aisyiyah yang tergabung dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Dalam rilis hasil Exit Poll Pemilu 2019 yang dilakukan oleh lembaga Indikator, masyarakat yang berafiliasi dengan Muhammadiyah yang memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf sebesar 34,%, dan yang memilih Prabowo-Sandiaga sebesar 66% (I. P. Indonesia, 2019).

Pemilihan Presiden 2024

Pilpres 2024 dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 dan diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pada Muktamar Muhammadiyah ke 49 di Surakarta tahun 2023, suksesi kepemimpinan 2024 menjadi salah satu tema yang dibahas pada permusyawaratan tertinggi tersebut. Muhammadiyah berharap siapapun presiden yang terpilih dapat mengutamakan dan mendorong kepemimpinan yang mempunyai program berdasarkan visi kebangsaan dan visi kenegaraan yang kuat, menghargai kemajemukan dan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta menyatukan, memakmurkan dan memajukan Indonesia.

Presiden terpilih harus menjadi tokoh negarawan sejati yang memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Sehingga dapat mandiri dan tidak terpengaruh kepentingan asing maupun domestik yang senantiasa membelokkan negara dari fungsi dan orientasi kepatuhan konstitusional (*constitutional obedience*) dan keluhuran nilai Pancasila. Presiden terpilih juga diharapkan mempunyai prinsip politik demi tercapainya kesejahteraan bagi rakyat secara adil, amanah, terpadu dan menyeluruh.

Dalam rangka menyebarkan politik nilai tersebut, PP Muhammadiyah mengundang tiga pasangan calon untuk mengadakan dialog dan uji publik di tempat yang berbeda. Pasangan Anies-Muhaimin melakukan uji publik di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 22 November 2023, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada 24 November 2023, dan pasangan Ganjar-Mahfud di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada 23 November 2023. Selain uji publik dan dialog, para pasangan calon juga diberikan Kartu Anggota Kehormatan Muhammadiyah.

Menurut Haedar Nashir, tujuan diberikan Kartu Anggota Kehormatan Muhammadiyah tersebut agar para calon selalu ingat aspirasi, pesan, dan pemikiran Muhammadiyah saat mendapatkan amanah menjadi presiden dan wakil presiden (M. Muhammadiyah, 2023). Selain itu, Muhammadiyah juga ingin menghormati setiap tokoh bangsa yang memiliki rekam jejak panjang dalam memimpin bangsa, sehingga ketika nanti diamanahi oleh rakyat juga selalu bisa menjaga kehormatan dan kepercayaan rakyat.

Di kubu pasangan Anies-Muhaimin terdapat relawan Garda Matahari yang dipimpin Azrul Tanjung dan Milennial untuk Perubahan yang dipimpin oleh Beni Pramula (mantan Ketua IMM). Di kubu pasangan Prabowo-Gibran terdapat relawan Matahari Pagi yang dipimpin Sutia Budi (Wakil Rektor ITB Ahmad Dahlan), Aliansi Muda Indonesia Maju yang dipimpin Fikri Yasin (mantan DPP IMM), dan Bergerak 1912 yang dipimpin Najih Prasetyo (sekretaris PM). Sementara di kubu Ganjar-Mahfud terdapat relawan Gerakan Persyarikatan Berkemajuan

yang dipimpin Faozan Amar (mantan DPP IMM), Gerak Matahari yang dipimpin Dzulqarnaen, dan Ganjar Gaskeun Milenial Unity yang dipimpin Bustanul Iman.

Dalam Timnas Anies-Muhaimin terdapat Azrul Tanjung (Majelis PP Muhammadiyah) dan Soetrisno Bachir (Majelis PP Muhammadiyah). Di Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran terdapat Raja Juli Antoni, Saleh Daulay (mantan Ketua PM), Fauzan (Rektor Universitas Muhammadiyah Malang). Di Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud terdapat Ahmad Rofiq. Sebagaimana pada pilpres sebelumnya, PP Muhammadiyah menegaskan warga ataupun pimpinan Muhammadiyah otomatis nonaktif dari kepengurusan jika memilih masuk ke dalam tim sukses calon presiden saat pilpres 2024 (Hakim, 2023).

Meski begitu, banyaknya kader yang terlibat aktif dalam proses pilpres membuat Muhammadiyah berulang kali mengeluarkan himbuan, baik secara keorganisasian melalui pernyataan resmi, ataupun disampaikan oleh anggota PP Muhammadiyah. Himbuan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi disintegrasi antar warga Muhammadiyah, sehingga nilai dan marwah Muhammadiyah senantiasa bisa terjaga (Sukadiono, 2024).

Dalam rilis hasil Exit Poll Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Poltracking, warga Muhammadiyah yang akan memilih Anies-Imin sebesar 34,5%, Prabowo-Gibran 50,5%, Ganjar-Mahfud 12,0%, dan yang tidak menjawab 3,0% (P. Indonesia, 2024). Begitupun rilis hasil Exit Poll Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Indikator, masyarakat yang berafiliasi dengan Muhammadiyah dan ormas lainnya yang memilih pasangan Anies-Imin sebesar 34,7%, Prabowo-Gibran sebesar 55,2%, dan Ganjar-Mahfud sebesar 10,2% (I. P. Indonesia, 2024). Dua hasil Exit Poll diatas menunjukkan bahwa warga Muhammadiyah mayoritas memilih pasangan Prabowo-Gibran.

4. Kesimpulan

Muhammadiyah memahami bahwa politik merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam, yakni yang berkaitan dengan *mu'amalah duniawiyah*. Dalam hal ini, Muhammadiyah memilih untuk berjuang dalam politik kebangsaan atau *high politics*, bukan politik kekuasaan atau *low politics*. Sekalipun bukan organisasi politik, Muhammadiyah tidak dapat melepaskan diri dari setiap momen politik yang terjadi. Bahkan Muhammadiyah menuntut setiap warganya agar berpartisipasi aktif dalam setiap proses politik, termasuk di dalamnya adalah pemilihan presiden secara langsung yang telah berjalan sejak tahun 2004.

Berdasarkan amanat Khittah dan sikap keorganisasian yang terus disampaikan, Muhammadiyah menyatakan diri netral aktif di setiap momen pilpres. Meski begitu, pada pilpres 2004 dan 2009 Muhammadiyah terlihat mendukung salah satu pasangan calon sekalipun tidak diungkapkan secara vulgar. Pun sikap keberpihakan tersebut juga tidak diikuti oleh seluruh warganya, sebab Muhammadiyah membebaskan warganya untuk memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Keteguhan sikap netral aktif Muhammadiyah setidaknya benar-benar teruji dalam pilpres 2014, 2019 dan 2024.

Dalam rangka mengakomodir aspirasi Muhammadiyah untuk kepentingan bangsa, Muhammadiyah berupaya menyisipkan gagasannya melalui ruang pemaparan visi-misi dan uji publik bagi para kontestan pilpres. Ekspresi politik warga Muhammadiyah juga diungkapkan secara beragam melalui keterlibatan dalam tim sukses, membentuk kelompok relawan dan preferensi calon presiden yang akan dicoblos. Pilihan ekspresi tersebut tentu dengan tidak membawa simbol dan sarana prasarana Muhammadiyah.

Dengan melihat rekam jejak tersebut, Muhammadiyah berupaya semaksimal mungkin untuk terlibat dalam proses pilpres tanpa harus menjadi bagian dari politik praktis, baik menjadi

partai politik atau mendukung salah satu pasangan calon. Konsistensi sikap seperti inilah yang diharapkan senantiasa dipegang oleh Muhammadiyah agar semakin teguh melaksanakan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Daftar Pustaka

- Ainur, A. (2023, Desember). Siapapun Presidennya, Aspirasinya Tetap Muhammadiyah. *Majalah MATAN*.
- Al Hamdi, R. (2009, Maret 1). Fatsun Politik Muhammadiyah. *Harian Republika*.
- Al Hamdi, R. (2023). *Akal Politik Muhammadiyah* (1 ed.). Deepublish.
- Al-Barbasy, M. M. (2018). Muhammadiyah dan Politik: Dilema Antara Keep Close dan Keep Distance. *Kontekstualita*, 34(02). <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v34i02.40>
- Amin, S. (2004). *Muhammadiyah Dukung Amien Rais Sebagai Presiden*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/39468/muhammadiyah-dukung-amien-rais-sebagai-presiden>
- Amirullah, A. (2014, Mei 24). *Din Tegaskan Muhammadiyah Tidak Berpihak Pada Satu Capres*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/435830/din-tegaskan-muhammadiyah-tidak-berpihak-pada-satu-capres>
- Amrullah, A. (2014, Maret 24). *Pelajar Muhammadiyah Ikut Pantau Proses Pemilu 2014 | Republika Online*. Republika Online. <https://republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/24/n2x04r-pelajar-muhammadiyah-ikut-pantau-proses-pemilu-2014>
- Anwar, M. K. (2023). Kajian Filosofis Konsep High Politics Amien Rais dan Korelasinya dengan Penafsiran Buya HAMKA dalam Tafsir Al Azhar. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 91–113. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i1.351>
- Bambang, B. (2009, Maret 30). *Muhammadiyah Keluarkan Pernyataan Sikap Pemilu 2009*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/136538/muhammadiyah-keluarkan-pernyataan-sikap-pemilu-2009>
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Dewi, K. H. I. (2010). *Peranan Amien Rais dalam Partai Amanat Nasional 1998-2005* [Universitas Sanata Dharma]. <https://repository.usd.ac.id/25208/>
- Effendi, D. (2014). *Politik Elite Muhammadiyah: Studi Tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah*. Reviva Cendekia.
- Hakim, L. (2023, November 17). *PP Muhammadiyah Tegaskan Anggotanya Nonaktif Jika Masuk Tim Capres*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3828768/pp-muhammadiyah-tegaskan-anggotanya-nonaktif-jika-masuk-tim-capres>
- Indonesia, C. (2019, Februari 17). *Sidang Tanwir Berakhir, Muhammadiyah Netral di Pilpres 2019*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190217140905-32-369987/sidang-tanwir-berakhir-muhammadiyah-netral-di-pilpres-2019>
- Indonesia, I. P. (2014). *Hasil Exit Poll Pemilu Presiden RI 2014*. Indikator Politik Indonesia.
- Indonesia, I. P. (2019). *Exit Poll Pemilu 2019*. Indikator Politik Indonesia.
- Indonesia, I. P. (2024). *Rilis Exit Poll Pemilu 2024: Basis Demografi dan Perilaku Pemilih*. Indikator Politik Indonesia.
- Indonesia, P. (2024). *Temuan Exit Poll Pilpres 2024*. Poltracking Indonesia.
- Jurdi, S. (2010). *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Pustaka Pelajar.
- Muhammadiyah, M. (2023, November 24). *Uji Publik Selesai, Seluruh Capres-Cawapres yang Hadir Terima Tanda Anggota Kehormatan Muhammadiyah*. Muhammadiyah.

- <https://muhammadiyah.or.id/2023/11/uji-publik-selesai-seluruh-capres-cawapres-yang-hadir-terima-tanda-anggota-kehormatan-muhammadiyah/>
- Muhammadiyah, P. P. (2010). *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2019). *Kuliah Kemuhammadiyahan 2*. Suara Muhammadiyah.
- Putro, A. A. (1999). High Politics sebagai Kerangka Moral Pemikiran Politik Muhammadiyah. *Bestari*.
- Rais, A. (2004). *Hubungan Antara Politik dan Dakwah; Berguru Kepada Muhammad Natsir*. Mujahid.
- Saifullah, M. (2009, Juli 3). *Din: Muhammadiyah Berdoa JK Jadi Presiden: Okezone News*. Okezone News. <https://news.okezone.com/read/2009/07/03/268/235320/din-muhammadiyah-berdoa-jk-jadi-presiden>
- Sholikin, A. (2020). Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 5(2), 1–19. <https://doi.org/10.52447/polinter.v5i2.4050>
- Sukadiono, S. (2024, Februari). Anomali Organisasi dalam Geliat Kekuasaan. *Majalah MATAN*.
- Suwarno, S. (2005). Perilaku Politik Muhammadiyah dalam Relasi dengan Negara pada Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 6(2), 189–206.
- Syahputra, H. (2014). Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/120967/>
- Tanthowi, P. U. (2019). Muhammadiyah dan Politik: Landasan Ideologi Bagi Artikulasi Konstruktif. *MAARIF*, 14(2), 93–113. <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.65>
- Taufiq, R. (2010, Maret 16). *Alasan Muhammadiyah Tidak Memilih SBY-Boediono Terungkap*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/232862/alasan-muhammadiyah-tidak-memilih-sby-boediono-terungkap>
- Walinegoro, B. G., & Widodo, B. E. C. (2022). Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilihan Umum: Peran Muhammadiyah pada Pemilihan Presiden 2019. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(2), 241–262. <https://doi.org/10.15575/jispo.v11i2.12811>
- Widjaja, Y. P. A. (2018, Agustus 14). *Muhammadiyah: Kader Jadi Timses di Pilpres 2019*. *Urusan Pribadi*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/3618843/muhammadiyah-kader-jadi-timses-di-pilpres-2019-urusan-pribadi>
- Zainuddin, H. (2019). Kontribusi Organisasi Muhammadiyah dan NU Pada Pilpres. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(8). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i8.3881>